



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TAUFIK PERDANA**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **441221**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3000 m2/208 m2 di KAB / KOTA DOMPU, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA DOMPU, WARISAN Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA DOMPU, WARISAN Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 244.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 1.042.000.000**

**D. SURAT BERTAGIH** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 37.000.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	3.623.000.000
III. HUTANG	Rp.	856.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.767.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.